

# Artikel-Juris\_2010

*by* Alimin01 Alimin01

---

**Submission date:** 19-Jan-2021 08:43AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1489796646

**File name:** 010-10-Juris\_2010.pdf (313.8K)

**Word count:** 7093

**Character count:** 42755

## SOLUSI DALAM MENEKAN TINGKAT KEMISKINAN (SUATU ANALISA SOSIOLOGI EKONOMI ISLAM)

Oleh: Alimin

**Abstract.** *How can humans live happily is old problems and new problems as well, he is also the problem of micro and macro issues from of the economics perspective. There is no way to be able to live happily except by getting rid of the three enemies of man, namely poverty, ignorance and disease. In terms of social factors, poverty is also a chain where the chain can be broken. It is an interesting phenomenon to listen to the history of Islam that explains that the first holy war undertaken by Abu Bakr was the war against poverty in the form of warfare against the rich who do not want to pay the zakat that should be enjoyed directly to the poor. This paper explores the problems or social problems as an inspiration or a solution to the problem of poverty in the Islamic perspective.*

**Kata kunci:** solusi, tingkat kemiskinan, sosiologi, ekonomi islam

### PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2010 mencapai 31,02 juta atau 13,33 persen (Berita Resmi BPS No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010), namun data tersebut telah dipertanyakan banyak pihak karena data penduduk yang menerima raskin (beras rakyat miskin) mencapai 70 juta jiwa di tahun 2010 dari sekitar 237 juta jiwa rakyat Indonesia. Ini berarti jumlah penduduk miskin sebenarnya dua kali lipat dari data BPS. Sedangkan jumlah penduduk miskin dunia menurut data Bank Dunia Mencapai 1,35 milyar jiwa dengan standar penghasilan sama atau kurang dari 1,25 USD/hari.

Kemiskinan merupakan suatu bahasan yang tidak terlepas dari ilmu sosiologi. Para penggagas ilmu sosiologi sebenarnya membahas elemen-elemen sosial tidak terlepas dari fenomena kemiskinan dan pemerataan antara kelas masyarakat, seperti August Comte (1842) yang membagi tiga tahap hukum kemajuan manusia (supranatural, metafisika, dan positif), Émile Durkheim dengan pendekatan fungsionalisme berbagai elemen sosial, Herbert Spencer dengan pendekatan analogi organik, Karl Marx dengan pendekatan materialisme dialektis, dan Max Weber dengan pendekatan *verstehen* (pemahaman), yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia.

---

\*Penulis adalah Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Ushul Fiqh, Fiqh Kontemporer dan Ekonomi Islam pada STAIN Batusangkar

Kemiskinan adalah sebuah fenomena manusia sejak manusia ada. Adalah sebuah fenomena menarik untuk menyimak sejarah Islam yang menjelaskan bahwa perang suci pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah perang melawan kemiskinan dalam bentuk peperangan terhadap kaum kaya yang tidak mau membayar zakat yang secara langsung harus dinikmati kaum fakir miskin.

Pada kenyataannya, ilmu ekonomi makro (sayangnya hanya menitikberatkan pada aspek moneter dan fiskal) secara khusus atau sistem perekonomian (berangkat dari filosofi ekonominya) secara mendasar berusaha agar kemiskinan dapat terhapus pada semua tingkat atau kelas manusia, sedangkan pemerataan ekonomi dapat ditingkatkan. Bahkan berbagai ajaran filsafat dan agama memerintahkan dan memotivasi umatnya untuk banyak berderma agar kemiskinan dapat diatasi. Selanjutnya secara fitrah dasar, semua manusia ingin hidup senang, mulia, dan selalu lebih baik dari sebelumnya, ini berarti bahwa tidak ada manusia yang ingin hidup miskin atau susah. Maka, orang yang tidak melawan atau bahkan menyenangi kemiskinan dan kesusahan seperti kelaparan atau penyakit dapat dikatakan sebagai orang yang sudah keluar dari fitrah insaninya.

Nabi Muhammad saw dan para shahabatnya secara praktis telah membuktikan bagaimana kemiskinan harus dilawan, dan secara filosofis telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan tegas, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkata: "Harta ibarat sebuah sungai besar, sedangkan jatah manusia darinya adalah sama." (al-Ashfahani: 3375) Ali

bin Abu Thalib berkata: "Berkecukupan dalam keterasingan adalah tanah air sejati, kemiskinan di tanah air sendiri adalah suatu keterasingan dan sesungguhnya orang yang hidup berkekurangan adalah orang asing di negerinya sendiri." (Abi Al-adid, Tahkik: Abul-Fadhal: 2-13) Abu Dzar al-Ghifari berkata: Apabila kemiskinan masuk pada suatu negeri, maka kekufuran akan berkata pada kemiskinan itu, "Bawalah aku bersamamu." (el-Gammal, 1986: 45)

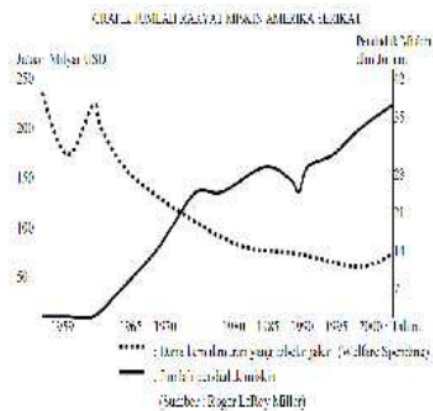
### KEMISKINAN SEBUAH FENOMENA GLOBAL

Meski secara fitrah manusia tidak menyukai kemiskinan, namun mengapa masih saja terjadi fenomena kemiskinan sepanjang sejarah manusia? Bahkan pada negara-negara yang dianggap paling maju dan termodern sekalipun kemiskinan merupakan fenomena menyolok. Misalnya negara super power Amerika, grafik dan prosentasi penduduk miskin pada negara kaya ini ternyata mencengangkan semua orang, kenapa masalah ini belum dapat mereka atasi secara baik? (Miller, 1997: 678)

Miller melaporkan bahwa Persekutuan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa konsumsi barang dan jasa sudah sedemikian meroket dan mengglobal, namun di bawah bayang-bayang kehidupan sangat konsumerisme itu terdapat *gap* yang sangat besar antara dunia kaya dan dunia miskin. Bahkan dalam sebuah negarapun terjadi hal yang demikian. Selanjutnya UNDP (*The United Nations Development Programme*) menyatakan: "Perilaku konsumsi yang berlebihan bukanlah sebuah kejahatan, namun hal demikian akan

menjadi menjadi skandal apabila orang-orang miskin tidak mempunyai makanan yang cukup sehari-hari apalagi untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan dasarnya.

Kita akan dapat melihat bahwa semakin besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan yang dikeluarkan negara, maka angka kemiskinan akan semakin menurun. Hal itu dapat tergambar pada grafik di bawah ini dan bahwa secara umum 16,5% penduduk AS tergolong miskin. Menurut Berita BBC Indonesia Tahun 2010 jumlah penduduk miskin AS mencapai 43,6 juta jiwa (<http://www.bbc.co.uk/indonesia/> akses: 16 September 2010)



Selanjutnya Miller menyatakan: "Keadaan industrialisasi suatu negara bukanlah suatu jaminan bahwa standar kehidupan negara tersebut akan meningkat. Dan data dengan sangat mengejutkan kita menunjukkan bahwa beberapa negara sangat miskin (*poorest country*) mempunyai rasio tertinggi dalam bidang industri, misalnya negara Subsahara Africa lebih besar industrinya dari Denmark; Zimbabwe, Bostwana, Trinidad, dan Tobago lebih besar industrinya dari Jepang;

dan, Argentina lebih besar produk industrinya dari Uni Eropa, akan tetapi negara-negara tersebut tetap saja tergolong negara-negara miskin. (Badawi, 1993: 778)

### Pengertian Kemiskinan secara Etimologi

Secara etimologi dalam bahasa Indonesia, miskin atau kemiskinan berarti *keadaan tidak berharta benda atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah*. Dan juga terdapat istilah *kemiskinan absolut* yang berarti *situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan minimum*. (Depdikbud, 1999: 660) Sedangkan miskin atau kemiskinan dalam bahasa Inggris adalah *poor* atau *poverty* dimana *poverty* adalah *the condition of being poor* atau *lack of money*. Sedangkan *poor* adalah *lacking riches* atau *needy*. Sedangkan *needy* adalah *being in want* (Webster's, 1980: 334). Dalam bahasa Arab kemiskinan diungkapkan dengan kata *al-miskin* atau *al-faqr*. *Al-faqr* berarti keadaan membutuhkan. Dan seorang faqir adalah seseorang yang hanya mempunyai sedikit makanan pokok (Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972:697). Sedangkan kata *al-miskin* berarti orang yang tidak punya cukup harta memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. (Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972: 440).

Beranjak dari pengertian bahasa kemiskinan secara umum berarti keadaan orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab arti kemiskinan

lebih dipersempit lagi dengan menunjukkan standar tertentu.

### Pengertian Kemiskinan secara Terminologi Ekonomi dan Syariah

Kemiskinan atau *poverty* secara ekonomi didefinisikan Abdurrachman sebagai *keadaan yang menunjukkan tidak adanya kenikmatan hidup dan suatu persediaan kebutuhan-kebutuhan yang tidak sebanding*. Kadangkala istilah kemiskinan didefinisikan lebih tepat sebagai *suatu titik dimana kehidupan tidak memungkinkan pemeliharaan efisiensi secara fisik, yaitu suatu keadaan ekonomi yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk membeli barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan pribadi* (Abdurrahman, 1991: 812).

Tingkat ekonomi yang lebih rendah dari kemiskinan adalah *pau-perism* (gembel; *al-faqah*) yaitu orang yang sama sekali tidak mampu membiayai diri sendiri meskipun untuk batas minimum kebutuhan pokok. Orang seperti ini harus disokong oleh beban pemerintah atau masarakat sampai pada kebutuhan minimal hidup (Abdurrahman, 1991: 812). Dan dikatakan juga bahwa *pau-perisation* (penggembelan) yang dimaksud oleh paham Sosialism adalah kepapaan secara sistemik dan tahapan yang menimpa kelas pekerja pada sistem ekonomi kapitalism yang disebabkan pemusatan harta kekayaan pada kalangan kapitalis (Badawi, 1993: 308).

Dalam **syariah Islam**, terdapat perbedaan antara istilah fakir dengan miskin, diantara definisi yang dikemukakan pada ulama Islam adalah:

1. Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab zakat, yaitu kurang dari 200 dirham (595 gram emas -1 dirham = 2,975 gr emas) di luar dari kebutuhan pokoknya. Untuk ukuran saat ini 1 gram emas senilai sekitar Rp. 150.000,- jadi 595 gram X Rp. 150.000,- = Rp. 89.250.000,-. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak punya harta tumbuh apapun, dan keadaanya lebih buruk dari orang fakir. (Hana<sup>1</sup>)
2. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta yang dapat tumbuh. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang dapat tumbuh tapi mereka tidak dapat hidup layak dengannya. (Syafi'i dan Malik<sup>1</sup>)
3. Fakir adalah orang yang tidak cukup memiliki makanan pokok selama sebulan - setahun karena standar waktu penggajian pada zaman pembuatan def<sup>1</sup>inisi tersebut adalah per tahun. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak punya harta apapun yang dapat tumbuh. (Maliki)

Bagaimana menilai bahwa seseorang itu miskin atau tidak? Menilai keadaan miskin seseorang tergantung pada waktu dan tempat. Berbeda dengan masa sekarang, pada zaman dahulu, seseorang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya pada tingkat tertentu tidak dianggap miskin, dan seseorang yang mempunyai gaji dibawah satu juta sebulan di kota besar dianggap miskin, tapi tidak pada daerah pelosok (Collins, 1994: 619). Nampaknya, manusia secara umum akan selalu di-

timpa kemiskinan karena kebutuhannya akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan budaya dan kemajuan peradabannya. Manusia zaman dahulu barangkali tidak merasakan kemiskinan meskipun sumber kekayaan tidak banyak, tetapi manusia zaman sekarang akan merasa atau menilai dirinya miskin sesuai dengan standar zamannya.

Namun, masih tetap ada masalah meskipun hanya dengan menggunakan jumlah rata-rata untuk membandingkan standar hidup material, berlawanan dengan, misal, indeks Pareto. Standar hidup mungkin juga hal yang subyektif. Sebagai contoh, negara dengan prosentase kelas atas yang sangat kecil yang sangat kaya dan dengan kelas rendah yang sangat besar dan sangat miskin dapat memiliki rata-rata pendapatan yang tinggi, meskipun kebanyakan penduduk memiliki "standar hidup yang rendah". Ini mencerminkan masalah pengukuran kemiskinan, yang juga cenderung relatif.

Jadi masalah kemiskinan adalah relatif, sesuai dengan zaman dan waktu dimana seorang yang dianggap miskin zaman ini sudah dapat dianggap kaya pada jika ia hidup pada masa dulu, apalagi ditambah dengan adanya kesadaran sosial dan keterbukaan informasi dimana seorang petani desa tidak akan pernah merasa miskin, kecuali setelah ia datang ke kota dan melihat kemewahan hidup orang kota. Dengan demikian, masalah kemiskinan bukan hanya tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan sehat, tapi termasuk juga masalah buruknya distribusi kekayaan atau menyoloknya besar pendapatan antar manusia (el-Gammal, 1986: 35). Kelaparan dan

kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, di mana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan (Bayu, Jurnal Ekonomi Rakyat, No. 7, Oktober 2003).

Selanjutnya penilaian keadaan miskin juga dipengaruhi oleh aspek non material lainnya, yaitu:

1. Kualitas kebutuhan pokok yang sudah didapatkan seperti besar rumah untuk jumlah individu tertentu secara kesehatan atau kondisi gizi makanan yang ia konsumsi.
2. Tingkat kondisi pelayanan kesehatan yang didapatkan.
3. Tingkat pendidikan yang diperoleh.
4. Jumlah jam kerja dalam sehari, seminggu, atau sebulan, atau sama sekali tidak punya waktu istirahat secara sehat.
5. Kemampuan untuk menyisihkan pendapatan untuk menghadapi keadaan darurat (Haikal, 1986: 801).

Menurut Peter Townsend, kemiskinan berdasarkan pada definisi Rowntree, kemiskinan dirujuk pada keadaan seorang individu seberapa banyak ia berhasil memperoleh makanan. Sedangkan menurut Rowntree, sebuah keluarga dapat dikatakan miskin apabila total pendapatannya tidak cukup untuk memperoleh kebutuhan pokok minimum untuk menjaga keadaan psikisnya.

Standar garis kemiskinan internasional adalah yang memiliki pengeluaran per hari sebesar US\$ 2 atau kurang, menggunakan metode

*purchasing power parity* (PPP). Selain itu, Bank Dunia juga menetapkan klasifikasi penduduk sangat miskin (*extreme poor*) untuk yang pengeluaran per harinya di bawah US\$ 1. Menurut estimasi, 32 juta penduduk Indonesia (15% dari populasi) termasuk dalam klasifikasi ini. Publikasi terakhir Bank Dunia (*World Development Report 2000/01*), yang memuat estimasi mengenai angka kemiskinan di Indonesia, kurang banyak dibicarakan. Padahal, angka yang diajukan Bank Dunia cukup fantastis. Pada akhir 1999, sebanyak 137 juta penduduk Indonesia - 66% dari total populasi - hidup di bawah garis kemiskinan.

Standar garis kemiskinan pada tahun 2004 mengacu kepada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), apabila konsumsi penduduk di bawah Rp123 ribu per kapita per bulan. "Penduduk yang hidupnya berada di sekitar garis kemiskinan atau hampir miskin itu jumlahnya sekitar 10,5 persen, sedangkan kenaikan harga BBM membuat standar garis kemiskinan pada tahun 2005 diperkirakan menjadi Rp140 ribu. Orang yang menerima kompensasi subsidi dari penduduk berkategori hampir miskin itu sekitar 60 persen sedangkan sisanya belum menerima, artinya, ada empat puluh persen penduduk dikategori hampir miskin itu yang menjadi berkategori miskin. Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan turun 2 persen pada 2005, dengan adanya penambahan penduduk miskin ini maka angka penduduk miskin secara keseluruhan menjadi 18,4 persen (KOMPAS, 13 Maret 2005).

Sebagai perbandingan, sebuah kalkulasi oleh *Social Monitoring for Early Response Unit*, berdasarkan da-

ta Susenas menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia adalah 16% dari populasi di awal 1999, dan turun menjadi 9,8% menjelang akhir 1999. Garis kemiskinan yang digunakan adalah Rp 80.000- Rp 85.000 pengeluaran per bulan untuk skala nasional. Jadi dapat dimengerti mengapa prosentase tersebut sedemikian kecil, karena tidak sesuai dengan standar layak, apalagi standar internasional, yaitu 60 USD/bulan.

#### KEMISKINAN SEBAGAI AKIBAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Apa faktor orang menjadi miskin? Menurut penulis ada beberapa faktor yang dapat membuat seorang individu atau kelompok menjadi miskin, yaitu:

1. Pengaruh kurang memiliki kapital sosial, seperti: Kurang berpendidikan (minus SDM); Tidak punya pengalaman; Tidak punya jaringan kerja; Sistem etnis yang tidak mendukung atau juga pengaruh sebagai etnis minoritas, termasuk pengaruh diskriminasi kelas sosial dan gender; Tidak punya koneksi karena memang tidak berusaha atau tidak mampu membangun koneksi tersebut, dan; Tidak punya moral yang baik (Pheni Chalid, 2005: 98-114) sehingga kehilangan kepercayaan dari lingkungannya.
2. Bukan keturunan kalangan kaya (*given*).
3. Kurang motivasi (manja dan tidak punya disiplin sikap ekonomi) atau *apathy*.
4. Sistem ekonomi masyarakat atau lingkungan buruk yang membuat

dia tidak punya peluang untuk keluar dari kemiskinan. Yang menjadi permasalahan utama pada fenomena kemiskinan adalah ketika seseorang sudah bekerja dan bersusah payah dalam hidupnya, kemiskinan tetap menghantunya, apalagi bila ia sudah kehilangan harapan untuk dapat keluar dari jerat kemiskinan tersebut. Secara ekonomi, kemiskinan adalah sesuatu yang bisa diprediksi berdasarkan berbagai indikator ekonomi suatu masyarakat (**Kompas, 30 Juni 2005**). Dan secara politik, kemiskinan bisa dijadikan sebagai alat untuk tujuan politik, terbukti isu pengaruh krisis terhadap kemiskinan yang diangkat mahasiswa cukup ampuh dalam gerakan menjatuhkan rezim Soeharto (Ari A. P, GATRA, 20 November 2000).

5. Budaya yang diciptakan seperti gaya hidup konsumerisme yang dengan sengaja dipromosikan oleh kalangan produsen sehingga mengurangi motivasi masyarakat untuk berhemat dan menabung.
6. Faktor agama atau kepercayaan (seperti gaya hidup sufistik atau biksu) yang mengajarkan bahwa kemiskinan itu lebih baik, walaupun ada beberapa ajaran agama yang mendorong manusia untuk berhemat dan mengembangkan kekayaan (Pheni Chalid: 9-11).
7. Kemiskinan sumber daya alam atau sebab alami, namun hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia, stratifikasi dan tahapan ekonomi (Pheni Chalid: 25-31).
8. Buruknya kondisi kesehatan, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mem-

punyai pengaruh besar, terhadap kemajuan ekonomi, dan bahwa biaya hidup orang miskin yang sakit sangat tinggi, baik dari biaya pribadinya maupun dari biaya sosial masyarakat (*private and social cost*)

Berdasarkan berbagai sebab di atas, penulis melihat ada dua bentuk penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Miskin karena faktor internal individu atau kelompok
2. Miskin karena faktor eksternal individu atau kelompok

Penyebab kemiskinan secara internal juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, misalnya kurangnya pendidikan seseorang bukan disebabkan oleh karena ia tidak mau, tapi karena tidak mampu atau tidak punya peluang. Namun secara umum, sebab-sebab internal individu dari kemiskinan dapat dipahami dengan baik oleh semua orang, karena seorang yang pemalas dan tidak punya pertimbangan ekonomi dalam hidupnya, tentu saja akan menjadi miskin.

Dengan demikian, kemiskinan dapat dipandang sebagai masalah individu, lokal, politik, sosial, dan ekonomi. Secara ekonomi, kemiskinan dapat pula dipandang dari berbagai aspek, dan dalam makalah ini dibahas kemiskinan sebagai sebuah akibat dari sistem dan sosiologi ekonomi. Saat ini, setengah dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan kurang dari dua dolar US/hari. Tulisan Adam Smith dan Alfred Marshal (*Principles of Economics*) telah mengenyampingkan bahwa kemiskinan mempunyai penyebab, ka-

rena mereka lebih memfokuskan kajian mereka pada penyebab kekayaan agar memberikan kesan bahwa ilmu ekonomi bermanfaat (Don Boudreaux, *The Economy*, 17 Agustus 2004).

Sebenarnya, kemiskinan secara langsung dibuat oleh sistem budaya dan undang-undang, karena pemerintah berpihak pada kaum kaya, dan kaum kaya itu yang mempengaruhi, mengarahkan, dan memformulasikan kemiskinan tersebut. Kepentingan individu atau negara kaya adalah agar mereka memperoleh sumber daya manusia yang murah dengan adanya rakyat atau negara miskin, dan hal ini dengan mudah dapat dilakukan pada zaman globalisasi dengan ciri perdagangan barang dan jasa secara bebas (John Gallagher and Ronald Robinson, *The Economic History Review*, 1953, Vol. VI). Zaman sekarang, kemiskinan bukan hanya menjadi masalah sosial ekonomi, tapi juga politik ekonomi, karena gaya merkantilisme yang terrepresentasi dalam perdagangan bebas menginginkan agar kekuatan suatu negara tetap melebihi negara lain, bahkan perang sebagai salah satu faktor kemiskinan juga dijadikan sebagai alat untuk menumpuk kekayaan negara-negara kaya atas nama demokrasi ekonomi (*economic democracy*). Michel Chossudovsky, Profesor Ilmu Ekonomi dari University of Ottawa, menjelaskan bahwa agenda negara-negara G7 hanyalah akan membuat sebuah proyek kemiskinan global (*The G7 Policy Agenda Creates Global Poverty*) yang ditandai dengan adanya *global debt, structural adjustment in the developed countries, capital flight, under the political tutelage of the creditors, crisis of the state, the demise of*

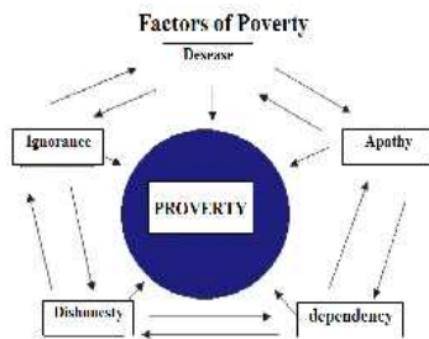
*central banks, the instability of global financial markets* (Majalah *Third World Resurgence*, no. 60, Agustus, 1995: 10).

Kemiskinan sebagai masalah individu tidak sama dengan kemiskinan sebagai masalah sosial karena ia berhubungan dengan budaya dan masyarakat. Penjajahan, perbudakan, perang, dan penaklukan adalah sebab sejarah dari sebuah kemiskinan, bukan sebagai faktor sosial. Di sini kita akan melihat sebab dari kemiskinan dari segi sosial. Faktor kemiskinan sebagai sebuah masalah sosial adalah ketidaktahuan (*ignorance*), kelesuan (*apathy*), penyakit (*disease*), ketidakjujuran (*dishonesty*) dan ketergantungan (*dependency*). Kelima faktor tersebut berkontribusi pada faktor selanjutnya, yaitu kekurangmampuan memasarkan potensi, kemiskinan infrastruktur, (*poor infrastructure*), kelemahan manajemen atau kepemimpinan, buruknya pemerintahan, keadaan selalu menjadi buruh yang tidak mempunyai jaminan hidup, kurangnya pengetahuan dan keahlian, kurangnya modal, dan seterusnya. Sedangkan semua faktor sekunder ini adalah masalah-masalah sosial yang berkontribusi dalam menciptakan kemiskinan, maka mengeliminir faktor-faktor tersebut adalah penting untuk mengentaskan kemiskinan.

Sumber daya manusia bukan hanya bermaksud kemampuan dalam memproduksi kekayaan, tapi juga pengelolaan kekayaan itu sendiri. Banyak negara meningkatkan pendapatannya ataupun mendapat bantuan luar negeri, namun yang sering terjadi dana tersebut tidak mereka gunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi real agar pertumbu-

han ekonomi berjalan maju dan pengangguran dapat ditekan. Mereka lebih suka membangun gedung-gedung pemerintahan yang megah, monumen-monumen agama, gedung perbelanjaan modern atau gedung olah raga dari pada membuat usaha produktif, industri, membangun infrastruktur seperti jalan dan komunikasi (Miller: 78).

Berikut ini adalah chart yang menunjukkan hubungan lima faktor tersebut dalam membentuk kemiskinan:



Kelima faktor kemiskinan di atas tidak berdiri sendiri, namun saling berhubungan dalam menciptakan kemiskinan. Adanya penyakit berkontribusi pada sikap ketidaktahuan atau *apathy* (kelesuan-keputusasaan). Ketidakjujuran berkontribusi pada ketidakmautahuan dan ketergantungan, dan seterusnya.

#### **Ketidakmautahuan (Ignorance)**

*Ignorance* bermaksud kurangnya informasi atau pengetahuan, dan termasuk juga keterampilan. Ia tidak sama dengan kebodohan. Oleh karena informasi adalah suatu kekuatan (*power*), maka orang yang punya informasi menyimpan informasi tersebut untuk diri mereka saja (*as a strategy of obtaining an unfair advantage*).

#### **Penyakit (Disease)**

Penyakit menyebabkan manusia tidak produktif dan menjadi penyebab langsung dari kemiskinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesehatan sangat mempunyai pengaruh besar, terhadap kemajuan ekonomi, dan bahwa biaya hidup orang miskin yang sakit sangat tinggi, baik dari biaya pribadinya maupun dari biaya sosial masyarakat (*private and social cost*).

Kesehatan akan memberikan kontribusi besar untuk menghapus kemiskinan melalui konsumsi air yang aman dan bersih, sanitasi, pengetahuan akan higienis, dan pencegahan penyakit. Namun demikian, sebagai faktor kemiskinan penyakit bisa dijadikan orang sebagai alat untuk menghasilkan harta, seperti penyakit tuberculosis (TBC) dikenal orang asing untuk berdagang obat dan juga HIV yang mengandung AIDS.

#### **Kelesuan (Apathy)**

*Apathy* terjadi ketika seseorang tidak peduli lagi karena ia merasa tidak mampu merubah nasib kepada yang lebih baik, atau ketika ia lihat orang gagal melakukan sesuatu, ia pun lesu untuk melakukannya. Kadangkala feneomena ini juga disebabkan oleh faktor dengan alasan takdir. Faktor agama dan nilai sosial di sini sangat berperan, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa agama dan nilai sosial dapat membuat orang peduli untuk memajukan ekonomi. Pheni Chalid dalam bukunya menjelaskan bagaimana agama Islam di Indonesia, Kaum Samurai di Jepang, dan Calvinis di Eropa

memotivasi kemajuan ekonomi (Chalid: 10-14).

#### **Ketidakjujuran (*Dishonesty*)**

Saat menyaksikan sebuah ketidakadilan (khususnya sikap pemerintahan yang korup), seseorang diam saja, ini merupakan suatu ketidakjujuran yang melahirkan ketidakjujuran baru. Pemerintah yang korup menyebabkan kemiskinan rakyat, rakyat yang miskin, terpaksa mencuri, ini berarti ketika kita membiarkan pencuri pencuri pertama, lahirlah pencuri kedua. Terlebih lagi apabila pencuri pertama melarikan atau menyimpan uang korupsi itu di bank luar negeri. Jadi sikap kita yang tidak tepat menyebabkan kemiskinan yang lebih luas.

#### **Ketergantungan (*Dependency*)**

Setelah datangnya bencana alam, sikap meminta atau menerima bantuan mungkin efektif untuk jangka pendek, tapi tentunya tidak untuk jangka panjang. Sikap suka menerima bantuan dari skup individu ataupun negara sangat besar pengaruhnya dalam memacu kemiskinan, karena suka menggantungkan diri pada bantuan pihak luar.

#### **KEMISKINAN DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

Dalam masalah ekonomi, ekonomi Islam tidak menyatakan bahwa sebab problematika ekonomi itu pada kemiskinan sumber alam dan tidak pula pada pertentangan antara bentuk produksi dan hubungannya dengan distribusi, akan tetapi pada sikap dan tindakan manusia. Mengapa? karena Islam percaya bahwa pa-

da hakekatnya Allah swt sudah memudahkan segala sumber alam bagi manusia. Oleh karena itu hal pertama yang harus diperbaiki adalah memperbaiki manusia itu sendiri agar ia terlepas dari sifat zalim (kadangkala dalam bentuk kejahatan individu terhadap publik -dalam kapitalis- atau oleh publik itu sendiri terhadap individu dalam sosialis-) dan sifat *kufur* dalam bentuk tidak memperhatikan pengolahan sumber alam dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, maka problematika ekonomi harus dilakukan dengan cara:

1. Mengembangkan segala potensi manusia untuk mengeksploitasi alam sebisa mungkin.
2. Mengharuskan manusia mentaati segala prosedur distribusi yang akan merealisasikan keadilan distribusi dimana dengannya akan bertemu kepentingan individu dan publik.

Selanjutnya Allah SWT menerangkan contoh dari penyelewengan manusia dari jalan yang benar dalam bidang *economic problem*:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (النحل: 112)

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari *ni`mat-ni`mat Allah*; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (QS. An-Nahal: 112).

Perhatikan ungkapan "بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" yang berarti "disebabkan apa yang selalu mereka *perbuat*", dalam bahasa Arab kata shana'a - صنع (Majma' al-Lughah: 525). berarti "membuat" bila dihubungkan dengan fiqh ekonomi, maka maksud ayat adalah "kesengsaraan yang mereka terima adalah karena buruknya sistem sosial dan ekonomi yang mereka buat"

Negeri yang disebut ayat di atas sudah mengalami kemajuan materi karena melimpahnya sumber daya alam yang mereka kelola dan didistribusikan secara baik, lalu mereka melakukan kezaliman ekonomi, maka akibatnya mereka kembali dihukum dengan hukuman (sangsi) ekonomi dari Allah yang dilambangkan dalam tersebut dengan kalimat "karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian *kelaparan (kemiskinan) dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka berbuat*"

Sedangkan sikap syukur dan taat akan membuahkan kemakmuran:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَقْبَلُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(الأعراف: 96)

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri *beriman dan bertakwa*, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka *Kami sik-sa mereka disebabkan apa yang mereka berbuat* (apa yang mereka usahakan). (QS. al-A'raf: 96).

Bila kita perhatikan pada kata "يَكْسِبُونَ" pada ayat ini, dalam bahasa Arab makna kata *kasaba* (كسب) adalah

"usaha mencari rezki dan penghidupan", maka jelaslah bahwa kesengsaraan yang mereka dapatkan langsung disebabkan oleh cara mereka yang salah dalam "usaha mencari rezki dan penghidupan". Ungkapan ini berkaitan langsung dengan sistem produksi dan distribusi, baik secara makro maupun mikro.

Dari perspektif ekonomi, pada berbagai ayat di atas, banyak kita temukan kata "iman, takwa, syukur, zalim, dan kufur", semua kata iman, takwa, dan syukur, adalah sebab kebahagiaan dunia (kemakmuran dan keredhaan Allah), sedangkan zalim dan kufur adalah sebab kesusahan dan bencana (kemiskinan dan kemarahan Allah). Kata-kata tersebut tidak dapat kita tafsirkan sebagai iman dalam konteks hubungan manusia dengan Allah saja yang berespek ibadah, tapi sekaligus perbaikan hubungan antara manusia dengan manusia dan alam karena dari hubungan sebab akibat kita perhatikan dipastikan ada hubungan langsung pada ungkapan tersebut antara "kata-kata" dengan kemakmuran dan kemiskinan. Misalnya, Islam mensyariatkan ketentuan batal atau khayar terhadap berbagai kontrak adalah bertujuan untuk menjauhkan sikap eksploitasi kaum kaya seperti ikhtiar dan kaidah khayar *al-ghubn al-fahisy* (harga menyolok).

Dengan demikian, solusi masalah ekonomi harus beranjak dari "perbaikan manusia" itu sendiri melalui cara: 1) mempersiapkan semua sumber daya manusia-material dan spiritual- untuk mengelola alam sebaik mungkin, 2) mendirikan sistem ekonomi yang dapat menegakkan keadilan produksi, distribusi, dan konsumsi secara makro dan mikro

(keseimbangan antara kepentingan individu dan publik; pemenuhan kebutuhan pokok-kafaf; sistem hukum ekonomi yang adil.

Oleh karena itu, jika seorang fakir merasakan kelaparan, itu merupakan bukti bahwa (terjadi karena) harta hanya dinikmati oleh orang-orang kaya (Abu al-Hadid, 1959: 408). Dan, diwajibkan bagi orang-orang kaya, dari penduduk seluruh negeri, untuk menanggung kebutuhan pokok orang-orang fakir di antara mereka dan pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Jika zakat dan juga *fai'* harta kaum Muslimin tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka untuk mereka harus disediakan bahan makanan pokok dan bahan-bahan primer lainnya, seperti pakaian untuk musim dingin dan musim panas, tempat tinggal yang dapat meneduhinya mereka dari hujan, rasa panas pada musim panas, sengatan matahari, dan tempat tinggal yang akan melindungi mereka dari pandangan orang-orang yang lewat. Seorang muslim tidak boleh sampai memakan bangkai atau daging babi, sementara ia mendapatkan kelebihan makanan pada temannya yang muslim atau dzimmi. Ia berhak memaksa dengan senjata untuk mendapatkannya, dan jika ia terbunuh maka orang yang membunuhnya harus membayar diyat, sedangkan jika orang yang menghalanginya terbunuh maka, penghalang itu mendapat laknat Allah, karena ia menghalangi orang untuk mendapatkan haknya, dan ia berarti termasuk kelompok orang yang memberontak. Allah swt berfirman:

*Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berlaku aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada apa-apa yang diperintahkan Allah..... (QS, al-Hujurat: 9)*

Penulis melihat bahwa Ekonomi Islam adalah ajaran pertama yang memberikan standar minimum untuk kemiskinan dan bagaimana cara masyarakat kaya memperlakukan manusia yang ditimpa kemiskinan tersebut. Al-Dalji (790-799 M) dalam bukunya *al-Falakah wa al-Maflukun* (Kemiskinan dan Orang-Orang Miskin) menyatakan bahwa perang suci pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah perang melawan kemiskinan, karena banyak orang kaya tidak mau membayar zakat, sedangkan zakat itu adalah hak kaum miskin.

Tentang hakekat perspektif Islam pada pemenuhan kebutuhan pokok, Hujjatul-Islam Abu Hamid Al Ghazali (450-505 H, 1058- 1111 M) berkata: "Sesungguhnya kemaslahatan agama tidak akan terwujud kecuali dengan terwujudnya kemaslahatan dunia. Maka, kemaslahatan agama adalah dengan ilmu pengetahuan dan ibadah, kedua hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan: 1) Badan yang sehat; 2) Kelangsungan hidup; 3) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan: Pakaian, Makanan pokok, dan Keamanan." Kemudian Imam Ghazali menerangkan:

*"Sungguh! orang-orang yang merasakan aman dalam masyarakatnya, bebas dari penyakit, dan dia mendapatkan makanan hariannya maka, seakan-akan dia telah meraih dunia dengan segala isinya....maka dari itu kemaslahatan agama tidak akan ter-*

*wujud kecuali dengan mewujudkan jaminan keamanan terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan vital ini, karena orang yang hari-harinya sibuk dengan bersiaga dari pedang-pedang kegelapan (ancaman-ancaman), dan mencari nafkah dalam ketakutan, kapankah orang seperti ini dapat mendapatkan waktu untuk menuntut ilmu dan bekerja dimana dua hal ini adalah jalan untuk menuju kebahagiaan akherat?, oleh karena itu, maka kemaslahatan dunia yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan adalah syarat untuk meraih kemaslahatan agama..."* (Al- Ghazali, t.th: 130)

Maka *keamanan sosial*, ketenteraman dalam pengadaan, keselamatan unsur-unsur sosialisasi dan pembangunan manusia dari segi materil dan moril dimulai dari badan yang sehat, jaminan kelangsungan hidup, pakaian, tempat tinggal, makanan pokok sampai jaminan keamanan yang menghapus segala faktor penyebab ketakutan, kecemasan dan keresahan. Seluruh unsur-unsur ini telah diletakkan konsep Islam dalam derajat "kebutuhan dan tuntutan primer" tidak hanya sekedar "hak" atau "pelengkap" dan lebih dari itu menjadi "kewajiban", dimana dengan perealisaiannya terealisasikan kewajiban-kewajiban agama dan ibadah-ibadah ritual, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali: "Maka, kemaslahatan agama tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan jaminan keamanan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan vital ini" (Imarah, 1998: 75).

Islam telah mensinkronkan dan mengkombinasikan berbagai unsur sosial pembangunan ekonomi melalui teori pemenuhan lima tuntutan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*) kare-

na unsur-unsur vital penegak pembangunan masyarakat Islam yang aman, yaitu: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab dan kehormatan, dan harta dengan menempatkan unsur agama sebagai kebutuhan vital utama karena ia dasar dan motor berfikir dan bertindak manusia. Pewajiban zakat merupakan salah satu upaya aplikasi prinsip menjaga harta. Jika dilihat pada sumber zakat kontemporer, sangat banyak sumber yang bisa diberdayakan di samping zakat mal seperti zakat *rikaz*, yaitu zakat barang tambang yang jumlahnya begitu melimpah.

Dengan adanya penentuan lima tujuan pokok umum syari'ah ini maka, perspektif Islam mempunyai keistimewaan dalam memandang unsur-unsur *kelayakan hidup* dibandingkan dengan persepsi-persepsi filsafat-filsafat non Islam, seperti filsafat-filsafat Kebatinan, *Gnoticisme*, *iluminism*, *positivism*, *materialism*, dan *utilitarianism*.

Dengan adanya dana pengembangan ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf, akan terwujud keadilan pada seluruh pelosok ummat sesuai dengan hasil yang dapat dikeluarkan dari buminya dan akan terwujud pula keadilan dalam pertumbuhan ekonomi sesuai dengan jenjang prioritas pemenuhan kebutuhan yaitu: primer, sekunder, pelengkap dan luks. Dengan dana *rikaz* ini juga ummat kita akan terlepas dari utang-utang luar negeri -penjajahan bentuk baru- yang menggadaikan sumber-sumber daya, idealis, kebebasan, dan kehormatan ummat kepada para penghutang.

### **Al-Quran Memaparkan beberapa Penyebab Kemiskinan**

Apabila sebuah kezaliman sudah mengalahkan keadilan kemudian harta hanya beredar (dimonopoli) di kalangan orang-orang kaya dan terpusatlah kemiskinan pada mayoritas rakyat, maka hal tersebut adalah merupakan awal dari akhir pembangunan kebudayaan dan jalan turun menuju kehancuran dan kejatuhan (Imarah, 1998: hal. 89). Akan tetapi berbeda halnya dengan kondisi ideal yang diwajibkan Allah SWT terhadap umat penutup -umat Islam- yang mengemban syari'ah abadi dimana Allah SWT menghendaki darinya keabadian persaksian dan sebagai para saksi atas sekalian alam:

*"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu" (QS, 2:143)*

Penulis menyimpulkan bahwa sebab utama kemiskinan adalah buruk perilaku manusia dalam mengelola harta, maka hal pertama yang harus dilakukan mengendalikan kalangan bermodal (kaya) dan punya kekuasaan (penguasa) secara baik, karena sebenarnya fitrah dasar manusia tidak ada yang ingin susah atau miskin. Diantara sebab utama kemiskinan adalah:

#### ***Monopoli Harta dan Kekuasaan adalah Penyebab al-Thugyan***

Sirkulasi harta kekayaan harus diperhatikan dan dikontrol pada awal dan sebelum segala sesuatu, dengan standar pemenuhan dan

pencukupan kebutuhan keseluruhan umat, setelah itu diperbolehkan untuk bagi setiap warga untuk berbeda-beda dalam tingkat kuantitas harta yang dimilikinya, agar yang kaya tidak semakin kaya dan mereka tidak memonopoli kekayaan sesama mereka saja:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya (QS, 59:7).*

Fenomena Qarun si penumpuk harta dan si Fir'aun yang tiran dan congkak tak lain hanyalah merupakan buah pahit dari perasaan telah meraih segalanya (superioritas) dan pemegangan kekuasaan tunggal (diktator), baik dalam sikap terhadap harta ataupun dalam kekuasaan pemerintahan (Untuk lebih jelas rujuk: QS, 28:76-77).

#### ***Kesemenaan Kaum Mutrafun (Kaum yang Hidup Mewah dan Berlebihan)***

Mereka dapat disamakan dengan kaum pengkonsumsi kekayaan barang dan jasa dunia terbesar, sebagaimana yang disinyalir oleh UNDP PBB. Kaum *mutrafun* bukan hanya berarti kaum kaya yang hidup bermewah-mewah, akan tetapi mereka yang menggunakan harta kekayaan mereka dengan tanpa mema-

kai kendali syari'ah, di antara ciri mereka adalah monopoli harta, hidup dengan bermewah-mewah dan cenderung menghamburkan harta, tidak mau mengeluarkan hak kaum fakir miskin, dan mereka berbuat arogan dengan harta tersebut.

Kehancuran sosial, budaya dan ekonomi di atas terjadi, karena adanya orang-orang *mutrafun* (bermewah-mewah dan menghamburkan harta) selalu saja menjadi para penentang Rasul-Rasul Allah dan risalat-risalat langit yang datang dengan membawa pembaharuan (reformasi), kebangkitan dan keamanan untuk kehidupan peradaban sosial pada setiap umat, bahkan penentangan mereka ini sudah mencapai derajat undang-undang yang mereka undang-kan:

1  
*"Dan Kami tidak mengutus ke suatu negeri seorang pemberi peringatan-pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu utus untuk menyampaikannya. Dan mereka berkata: "kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (dari pada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab" (QS, 34:34-35),*

Pada galibnya para *mutrafun* adalah musuh reformasi peradaban dan pendukung kejumudan (stagnasi) atas tradisi usang yang menopang realita kezaliman yang terjadi (lihat: QS, 43:23). Kemewahan yang menjadikan para pelakunya sebagai penghalang di depan pembaharuan peradaban dan kebangkitan pembangunan merupakan suatu "kejahatan" (kriminalitas) terhadap "hak" sosial masyarakat secara umum, ditambah lagi dengan praktek kehidu-

pan mereka yang penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran terhadap batas-batas yang ada. Kemewahan memberikan kepemimpinan dan kekuasaan kepada para pelakunya (*mutrafun*) telah membuat mereka menjadi suatu "kekuatan" yang akan membawa orang-orang yang zalim kepada kriminalitas dan kriminalis:

*Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan kemewahan yang ada pada mereka, sedangkan mereka adalah orang-orang yang jahat (QS, 11:116).*

#### ***Pemungisian Harta Bukan al-Kanzu (peng-idle-an)***

Penggunaan (pemungisian) harta yang berlebih dari pencukupan kebutuhan dengan memodalkan dan meninvestasikannya adalah untuk maslahat umum dan pertumbuhan pembangunan umum serta menjadikan dan memudahkan orang-orang yang masih membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya. Demikianlah pengertian Islam terhadap penggunaan harta yang disebut dengan "*Infaq al-'Afwu*", yaitu pemungisian harta yang berlebih dari pencukupan kebutuhan, seperti yang di sebut dalam Al-Quran: *Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Apa yang lebih dari keperluan" (al 'afwu). (QS, 2: 219)*

Adapun kewenangan (arogansi), *Istighna'* (penyandaran total terhadap harta dan merasa sudah meraih segalanya) dan monopoli terhadap harta kekayaan inilah yang disebut dengan "*al-Kanzu*" (penumpukan dan penyimpanan) yang disebut dalam al-Quran (Lihat: QS, 34-35).

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, ditinjau dari sosiologi ekonomi, yaitu dalam lingkup hubungan antara individu dengan masyarakat (interaksi sosial), ekonomi sebagai sebuah fenomena sosial atau dengan ungkapan lain "lingkup kegiatan ekonomi dan perilaku sosial yang tidak dapat dibedakan sehingga aspek sosial" yang menjadi penggerak utama manusia untuk mengembangkan kekayaan, penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Faktor kemiskinan ditinjau dari segi sosiologi ekonomi atau faktor kemiskinan sebagai sebuah masalah sosial adalah ketidaktahuan (*ignorance*), kelesuan (*apathy*), ketidakjujuran (*dishonesty*) dan ketergantungan (*dependency*). Ke empat faktor tersebut berkontribusi pada faktor selanjutnya, yaitu kekurangan kemampuan memasarkan potensi, kemiskinan infrastruktur (*poor infrastructure*), kelemahan manajemen atau kepemimpinan, buruknya pemerintahan, keadaan selalu menjadi buruh yang tidak mempunyai jaminan hidup, kurangnya pengetahuan dan keahlian, kurangnya modal, dan seterusnya. Semua faktor sekunder tersebut adalah masalah-masalah sosial yang berkontribusi dalam menciptakan kemiskinan, maka mengeliminir faktor-faktor tersebut adalah penting untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan aspek sosial yang langsung berhubungan sebab akibat dengan kemiskinan utamanya adalah karena miskinnya "modal kapital" seseorang. Secara ringkas aspek tersebut adalah:
  - a. Hubungan dengan lingkungan yang buruk seperti: hubungan kekeluargaan dan hubungan etnis yang buruk, hubungan dengan koneksi bisnis yang buruk, tidak punya jaringan kerja atau tidak punya koneksi (minus hubungan sosial), karena secara ekonomi, ukuran kekayaan adalah uang, maka bagaimana seseorang sukses memperoleh uang dalam masyarakat sosialnya, berarti ia sukses dalam masyarakat (secara normal, bukan pendapatan tidak normal - haram), atau ia dianggap sukses membuat hubungan baik (interaksi) dengan manusia (sumber daya insani) dimana modal utamanya adalah kepercayaan (*trust*) yang diberikan masyarakat kepadanya. Dan karena tingkat harmoni dan konflik diri dengan lingkungan merupakan faktor utama kesuksesan seseorang.
  - b. Regularisasi sosial yang buruk, karena sistem ekonomi masyarakat atau lingkungan buruk yang membuat dia tidak punya peluang untuk keluar dari kemiskinan. Ali bin Abu Thalib berkata: "*Berkecukupan dalam keterasingan adalah tanah air sejati, kefakiran di tanah air sendiri adalah suatu keterasingan dan sesungguhnya, orang yang hidup berkekurangan adalah orang asing di negerinya sendiri.*". Selanjutnya tawar menawar perdagangan dunia dalam bentuk tekanan politik merupakan sebuah fenomena sosial ekonomi. Agenda perdagangan bebas dunia bila tidak diatur dengan baik, justru akan memperparah nasib kaum miskin, serta membuat *imperialis* ekonomi baru dari negara kuat terhadap negara lemah, atau

- dari kalangan bermodal ekonomi dan sosial kuat terhadap kalangan lemah, seperti munculnya fenomena tekanan hutang global (*global debt*), lemahnya penyesuaian negara berkembang terhadap perkembangan baru, pelarian modal (*capital flight*), dan ketidakstabilan pasar uang.
- c. Tekanan budaya, seperti sistem etnis yang tidak mendukung atau juga pengaruh sebagai etnis minoritas, termasuk pengaruh diskriminasi kelas sosial dan gender.
  - d. Budaya yang diciptakan seperti gaya hidup *konsumerisme* yang dengan sengaja dipromosikan oleh kalangan produsen sehingga mengurangi motivasi masyarakat untuk berhemat dan menabung.
- e. Faktor agama atau kepercayaan (gaya hidup sufistik atau biksu) yang mengajarkan bahwa kemiskinan itu lebih baik, walaupun ada beberapa ajaran agama yang mendorong manusia untuk berhemat dan mengembangkan kekayaan.
2. Islam menganggap bahwa faktor kemiskinan terutama karena sikap dan tindakan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk sosial harus diperbaiki terlebih dahulu, sikap manusia dalam mengelola kekayaan harus dikendalikan, bukan dibebaskan dan bukan pula di"tiada"kan.
  3. Islam sudah memberikan standar yang cukup tinggi untuk miskin sebagai tanggungjawab individu dan masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'ah al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah wa al-Ihshaiyyah*, (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986), h. 801
- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991
- Abu Hamid Al Ghazali, *al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*, (Cairo: Toko Buku dan Penerbit Shabih, t.th), h. 130
- al-Ashfahani, *al-Aghani* (Kairo: Daar al-Sya'ab), juz: IX
- Badar Abdurrahman Muhammad, *al-Hayah as-Siyasiyyah wa Mazhahir al-Hadharah fi al-'Iraq wa al-Masyriq al-'Arabi*, Mesir: Maktabah Anglo al-Mishriyyah, 1989
- Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Dictionary of Economic* Terj. Drs. Rumapea, MA. Dan Drs. Posman Haloho, MA., *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1998
- <sup>1</sup> Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), 619
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Factors of Poverty* GATRA, Ari A. Perdana, 66% Rakyat Kita Miskin, Jakarta, 20 November 2000

- Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Ibnu Abi Al Hadid, *Syarhu Nahjil-Balaghah*, Tahkik: Muhammad Abul-Fadhal (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1995), juz. XI
- Ibrahim ath-Thahawi dalam bukunya *al-Iqtishâd al-Islâmi Madzhaban wa Nizhaman*, Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah li asy-Syu'un al-Mathabi' al-Amiriyah, 1974
- 'Imarah, Muhammad, *Qamus al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dâr asy-Syuruq, 1993)
- 'Imarah, Muhammad, *al-Amn al-Ijtima'iy fi al-Islam*, (Kairo: Dâr asy-Syuruq, 1998)
- Jayati Ghosh dalam *The Real Causes of Poverty*
- John Gallagher and Ronald Robinson, "The Imperialism of Free Trade," *The Economic History Review*, Second series, Vol. VI, no. 1 (1953)
- Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel - Th. II - No. 7 - Oktober 2003. Bayu Krisnamurthi, Kepala Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor (PSP-IPB)
- Kazhim Muhammadi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Nahj al-Balaghah*, (Beirut: Dar al-Adhwa', 1989 M/ 1406 H)
- Kompas Kamis 30 Juni 2005-12-26
- KOMPAS: Minggu, 13 Maret 2005
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972
- Mohamed Abd el-Monem el-Gammal, *Islamic Economy*, (Beirut: Dâr al-Kitab Allubnani, 1986), cet. II
- Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudhu'I li Suwar al-Quran al-Karim*, Mesir: Dar asy-Syuruq, tth
- Muhammad al-Hashri, *as-Siyasah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Kairo: Maktab al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1995
- Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar an-Nafais, 1988)
- Muhammad Syauqi al-Fanjiri, *al-Madzhab al-Iqtishadi al-Islami*, Jeddah: Syirkah Maktabah 'Ukkaz, 1981
- Chalid, Pheni, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: CSES UIN, 2005)
- Bartle, P. 2008. Factors of poverty: The big five. *Community empowerment*. <http://www.scn.org/cmp/modules/emp-pov.htm>.
- Webster's New English Dictionary*, (USA: Merriam Company, Lebanon: Libraire du Liban, 1980)

# Artikel-Juris\_2010

---

## ORIGINALITY REPORT

---

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[docobook.com](http://docobook.com)

Internet Source

4%

2

[media.isnet.org](http://media.isnet.org)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On